

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang sedang berlangsung adalah Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya (Wulansari, 2023). Namun, seperti banyak proyek pembangunan skala besar lainnya, proyek KCIC tidak terlepas dari berbagai dampak negatif, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur pembangunan.

Salah satu kawasan yang terdampak adalah RW 04 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat setempat mengeluhkan berbagai dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat proyek ini. Dampak utama yang dirasakan adalah polusi udara yang semakin meningkat akibat pengurangan vegetasi dan tidak adanya langkah reboisasi dari pihak KCIC. Selain itu, pembangunan infrastruktur ini juga menimbulkan kebisingan akibat aktivitas konstruksi yang berlangsung hingga malam hari, yang berdampak pada kesehatan dan kenyamanan warga. Permasalahan tersebut sejalan dengan temuan (Burhanudin, 2024) yang menyatakan bahwa proyek KCIC telah menyebabkan kerusakan rumah warga, terganggunya sumber air bersih, dan meningkatnya gangguan kesehatan akibat pencemaran udara dan suara.

Dampak lainnya adalah keterbatasan akses jalan, di mana jalan yang sebelumnya digunakan warga menjadi terganggu akibat proyek ini. Meskipun pihak pengembang sebelumnya menjanjikan pembangunan akses jalan alternatif bagi warga RW 04, hingga kini janji tersebut belum

terrealisasi. Akibatnya, mobilitas masyarakat menjadi terhambat, mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial mereka sehari-hari (Burhanudin, 2024)

Dampak negatif ini seharusnya bisa dikendalikan melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurut (Kereh, 2023), AMDAL adalah dokumen yang berisi kajian mengenai dampak penting suatu proyek terhadap lingkungan dan menjadi syarat utama sebelum izin usaha atau pembangunan diberikan. Dalam proyek KCIC, AMDAL seharusnya menjadi alat mitigasi yang memastikan pembangunan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, minim risiko sosial, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Namun, implementasi AMDAL dalam proyek KCIC tampaknya tidak berjalan optimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak dampak negatif yang belum tertangani dengan baik, seperti tidak adanya reboisasi, meningkatnya polusi udara, serta akses jalan yang belum disediakan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan AMDAL dalam proyek KCIC lebih banyak bersifat formalitas administratif dibandingkan sebagai instrumen yang benar-benar melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Puspita Sari & Sanjaya, 2020)..

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Masyarakat Risiko (Ulrich Beck). Beck berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, pembangunan sering kali menciptakan risiko-risiko baru yang tidak terdistribusi secara adil. Risiko ini lebih banyak ditanggung oleh kelompok masyarakat yang kurang berdaya secara ekonomi dan politik (Sulistiyowati, 2022), sementara pihak yang lebih kuat seperti perusahaan, investor, dan pemerintah lebih banyak memperoleh manfaat.

Dalam konteks proyek KCIC, masyarakat RW 04 menjadi kelompok yang paling terdampak oleh risiko lingkungan dan sosial akibat pembangunan ini, seperti polusi udara, kebisingan, dan keterbatasan akses

jalan. Namun, mereka tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk menuntut perbaikan atau kompensasi yang sepadan. Di sisi lain, pihak investor, pemerintah, dan pemegang modal mendapatkan keuntungan besar dari proyek ini, tanpa harus mengalami dampak negatif yang sama.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi AMDAL dalam proyek KCIC dan dampaknya terhadap masyarakat RW 04 Desa Gadobangkong. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana masyarakat RW 04 beradaptasi terhadap risiko lingkungan dan sosial yang muncul akibat proyek ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan AMDAL serta bagaimana distribusi manfaat dan risiko pembangunan infrastruktur dapat lebih adil bagi masyarakat yang terdampak.

B. Rumusan Masalah

Untuk memahami fenomena ketimpangan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait Kesenjangan Implementasi AMDAL dalam Pembangunan KCIC di Rw 04 Desa Gadobangkong. Masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa dampak pembangunan KCIC terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat RW 04?
2. Bagaimana masyarakat RW 04 beradaptasi dengan dampak negatif pembangunan KCIC?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi implementasi AMDAL dalam proyek KCIC di RW 04 Desa Gadobangkong.
2. Menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan KCIC terhadap masyarakat setempat.

3. Mengidentifikasi strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak negatif proyek ini.

D. Kegunaan Penelitian

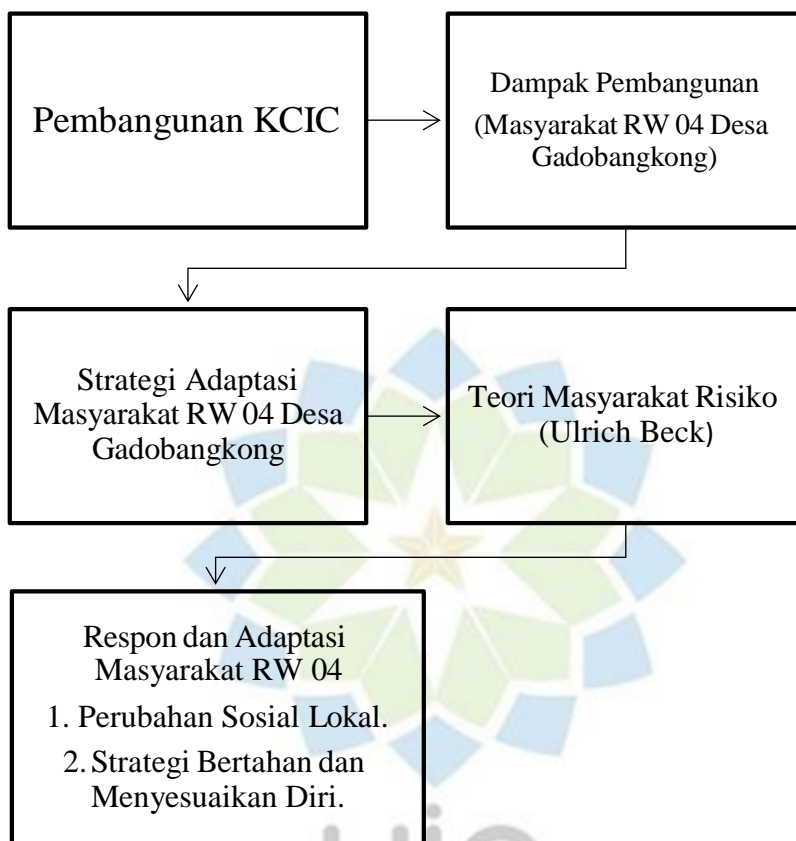
Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Menambah wawasan dalam kajian sosiologi lingkungan terkait implementasi kebijakan AMDAL dan dampak sosial-ekologis pembangunan infrastruktur.
2. Secara Praktis: Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan agar implementasi AMDAL lebih efektif dalam melindungi masyarakat terdampak.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan Teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck, yang menjelaskan bahwa dalam era modern, pembangunan sering kali menciptakan risiko yang lebih banyak ditanggung oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dalam konteks KCIC, AMDAL seharusnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan lingkungan, tetapi dalam praktiknya tidak diterapkan secara maksimal (Puspita Sari & Sanjaya, 2020). Akibatnya, masyarakat RW 04 harus menghadapi polusi udara, kebisingan, dan keterbatasan akses jalan tanpa perlindungan yang layak.

Gambar 1 1 Kerangka Berfikir



Sumber: Peneliti (2025)